

## BAB V

### SIMPULAN

#### 5.1 Simpulan

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia Soekarno–Hatta yang terpilih sebagai presiden dan wakil membentuk kabinet presidensial pertama. Kabinet tersebut mendapat tentangan dari golongan pemuda yang menganggapnya sebagai kolaborator Jepang. Dengan maklumat no.x maka diadakanlah perubahan susunan KNIP menjadi badan legislatif dan menuntut agar perlunya pengalihan tanggung jawab menteri kepada badan legislatif. Oleh sebab itu, Syahrir dan Amir yang menjadi ketua dan wakil Badan Pekerja KNIP dipercaya membentuk formatur. Dengan demikian terjadi pergeseran antara sistem presidensial Soekarno–Hatta ke sistem Parlementer ketika Syahrir akhirnya berhasil menyusun kabinet dan menjadi Perdana Menteri.

Amir merupakan keturunan seorang bangsawan dengan garis keturunan kakeknya yang bernama Mangaraja Monang seorang bangsawan Batak. Masa kecil Amir dihabiskan di *Europese Lagere School* (ELS) hingga pendidikan terakhirnya diselesaikan di *Rechtshoogeschool* (RHS) pada tahun 1932. Aktifitas politik Amir dimulai sejak masa di RHS, perhatian Amir Syarifuddin mulai dicurahkan sepenuhnya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Amir Syarifuddin sendiri tergabung dengan organisasi kedaerahan yaitu *Jong Sumatranen Bond* dan menempatkan diri sebagai pemimpin organisasi pemuda kedaerahan, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang organisator yang ulung. Kemudian Amir mendirikan Partindo sebagai partai politik yang memiliki garis perjuangan dengan prinsip politik yang radikal dan non kooperatif dengan pemerintahan kolonial. Pada masa Jepang Amir Syarifuddin menyusun suatu organisasi bawah tanah yang diberi nama “Liga Anti Fasis” yang mengakibatkan Amir ditangkap. Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun peristiwa tersebut tidak diketahui oleh Amir Syarifuddin, Ia baru dibebaskan dua bulan kemudian yakni pada tanggal 1 Oktober 1945. Amir Syarifuddin dijemput dari penjara di Malang,

sebagai seorang menteri dalam Kabinet Republik Indonesia yang merdeka. Amir Syarifuddin hampir tidak percaya bahwa Indonesia sudah merdeka dan ia juga diangkat sebagai seorang menteri hingga perdana menteri.

Selama dua tahun pertama sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Amir Syarifuddin menduduki jabatan menteri penerangan, menteri keamanan rakyat atau pertahanan dan kemudian perdana menteri. Amir Syarifuddin tidak lama menjabat sebagai menteri penerangan hanya selama dua bulan. Amir Syarifuddin mulai mengatur kementerian penerangan sebagai pusat penerangan Republik Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri agar dapat menjadi suatu kementerian yang efektif bagi penerangan tentang arti dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Dalam Kabinet Syahrir, Amir Syarifuddin juga diangkat menjadi menteri keamanan rakyat. Pengangkatan Amir Syarifuddin sebagai menteri keamanan rakyat pada awalnya diwarnai dengan pro dan kontra, kalangan tentara menolak pengangkatan tersebut karena kalangan tentara menginginkan pengangkatan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri keamanan rakyat. Keinginan tentara tersebut berdasarkan hasil musyawarah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dihadiri oleh para panglima divisi dan komandan resimen dari seluruh Jawa dan Sumatera. Setelah Amir menduduki menteri pertahanan maka ia menyatakan konsepnya tentang tentara yaitu dasar TKR, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa harus ada perbedaan antara TKR dengan kesatuan tentara yang ada sebelumnya, yaitu KNIL dan PETA. Amir juga menginginkan adanya jurang pemisah antara tentara dan rakyat. Kemudian kegagalan Syahrir dalam melakukan perundingan atau diplomasi bersama Belanda melalui perjanjian Linggarjati mengakibatkan mundurnya Syahrir sebagai perdana menteri, yang kemudian majunya Amir sebagai perdana menteri menggantikan Syahrir. Selanjutnya pemerintahan Amir Syarifuddin segera mengadakan kontak diplomasi dengan Belanda. Dengan menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda ini, Amir Syarifuddin sangat percaya pada bantuan dari Pemerintah Amerika dalam perundingan Renville.

Ketika Perjanjian Renville yang diwakili Amir sebagai perdana menteri dianggap merugikan, menjadi sebuah kecaman bagi Amir di parlemen yang

berdampak ditariknya dukungan kepada Amir sebagai perdana menteri. Tiga hari setelah melepaskan jabatan sebagai perdana menteri, Amir Syarifuddin membentuk FDR yang merupakan gabungan partai dan kelompok yang berhaluan kiri. FDR – koalisi dari anggota-anggota PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pesindo, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Sesudah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dengan ditandainya diserahkannya mandat oleh Amir Syarifuddin kepada presiden Soekarno, maka sebagai gantinya dibentuklah kabinet presidensil yang menunjuk Moh.Hatta sebagai perdana menteri. Selanjutnya FDR menjadi pihak oposisi terhadap kabinet Hatta dan FDR berusaha untuk menjatuhkan kabinet Hatta. FDR berharap dapat menggantikan kabinet presidensil dengan kabinet parlementer. Rencana Amir Syarifuddin dengan pemimpin FDR lainnya berjalan di luar apa yang diharapkan. Pada tanggal 3 Agustus 1948 di Bukit Tinggi tibalah Suripno perwakilan Indonesia di Praha bersama sekretarisnya yang bernama Muso. Setelah Muso diangkat menjadi sekretaris jenderal PKI, ia menganjurkan untuk mendirikan Front Nasional dan semua anggota partai harus bergabung di dalamnya. Sesudah peleburan Partai Sosialis ke dalam PKI maka Amir Syarifuddin bersama-sama Muso dan pimpinan PKI lainnya menjalankan aksi propaganda didepan para pemuda, buruh dan petani. Muso menyatakan bahwa Russia adalah pemimpin revolusi dunia dan Indonesia harus berada di bawah Soviet. Kalau di pihak Rusia kita adalah benar. Namun selanjutnya terjadi sebuah peristiwa yang tidak diduga oleh para pemimpin PKI telah terjadi di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, pada pagi hari pemberontakan PKI di Madiun dicetuskan oleh Sumarsono dan Djokosujono. PKI berhasil merebut Madiun dari tangan pemerintah dan mengajak agar PKI di daerah lain mengikuti jejak yang telah diambil oleh PKI di Madiun. Muso dan Amir Syarifuddin yang mendengar berita pemberontakan tersebut segera berangkat dari Purwodadi menuju Madiun. Mereka kini tidak dapat berbuat lain kecuali mendukung dan meneruskan pemberontakan yang telah dimulai tersebut. Pengakuan Amir Syarifuddin sangat mengagetkan umum, namun para pemimpin Indonesia non-komunis seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir berpendapat bahwa Amir Syarifuddin sebelumnya bukanlah anggota PKI meskipun ia mempunyai hubungan dengan PKI illegal. Amir Syarifuddin

bukanlah seorang komunis tetapi seorang nasionalis. Pengakuan Amir Syarifuddin saat ini disebabkan oleh dua faktor yaitu karena kekecewaannya kepada Amerika Serikat dan oportunisme politik.

## 5.2 Implikasi

Skripsi yang berjudul “Amir Syarifuddin dalam bingkai sejarah revolusi Indonesia (1945 – 1948)” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Bagi lembaga pendidikan SMA atau sederajat, diharapkan penelitian ini mampu menambah referensi sumber maupun bacaan terutama bagi Sejarah Wajib Indonesia kelas XI Kompetensi Dasar (KD) 3.11 Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. 4.10 Menalar perubahan dan perkembangan politik masa awal proklamasi dan menyajikanya dalam bentuk cerita sejarah. 4.11 Mengolah informasi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu, Belanda dan menyajikanya dalam bentuk cerita sejarah.

Sejarah Peminatan Kelas XII Kompetensi Dasar (KD) 3.4 Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950. 3.5 Mengevaluasi secara kritis peristiwa revolusi nasional dan sosial yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan. 3.6 Mengevaluasi secara kritis hubungan kausalitas kebijakan politik dan pemberontakan antara tahun 1948 – 1965. 4.4 Menyajikan informasi dalam bentuk tulisan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950. 4.5 Merekonstruksi peristiwa revolusi nasional dan sosial yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan dan menyajikan dalam bentuk tulisan. 4.6 Merekonstruksi hubungan kausalitas secara kritis hubungan antara kebijakan politik dan pemberontakan antara tahun 1948 – 1965, dalam bentuk tulisan.

## 5.3 Rekomendasi

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam meneliti sejarah revolusi Indonesia atau tokoh-tokoh nasional

Indonesia. Peneliti menyadari bahwa penulisan mengenai tokoh Amir Syarifuddin sudah banyak terutama keterkaitan dengan pemberontakan PKI Madiun, maka dari itu penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dalam membahas kelompok-kelompok oposisi terhadap pemerintahan Indonesia pada masa revolusi Indonesia.

Bagi Departemen Pendidikan Sejarah, penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa Pendidikan Sejarah terutama dalam mata kuliah Sejarah revolusi Indonesia.